

RINGKASAN BUKU

**IMPLEMENTASI NILAI NILAI ISLAMI DALAM PENGELOLAAN
MASYARAKAT MELAYU LANGKAT**

Dahlana Sari Marbun, Hasrita Lubis, Nurhayati

Universitas Islam Sumatera Utara

Langkat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara (dahulunya masuk keresidenan Sumatera Timur). Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon yang buahnya pahit. Dahulunya, buah ini banyak tumbuh di sekitar kawasan Kota Dalam berdekatan dengan Kampung Secanggang. Wilayah Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil yang beberapan diantaranya dulunya ini dapat dilayari kapal-kapal dengan muatan lebih kurang 30 ton. Terdapat beberapa aliran di sungai ini yang cukup deras dan rumit. Setelah melewati itu semua, terlihat budaya dari masyarakat sekitar dengan sawah terbentang luas dan tanah yang subur di wilayah Langkat. Lada menjadi salah satu produk ekspor terpenting di wilayah ini. Sementara itu, hutan hujan di sini juga memiliki banyak hasil alam berupa berbagai jenis kayu, lilin, kacang, gambir, dan beras yang diekspor. Belakangan ini, wilayah ini menjadi salah satu penghasil tembakau dan minyak bumi yang menjadi bahan ekspor tertinggi di Sumatera Timur.

Kesultanan Langkat merupakan salah satu kerajaan Melayu yang terletak di pesisir Timur Sumatera dan salah satu kesultanan terkaya di Sumatera Timur, selain Asahan, Serdang, dan Deli. Kerajaan yang didirikan oleh Dewa Syahdan inilah yang menjadi cikal-bakal Kesultanan Langkat. Pada awal pendirian, adanya keterkaitan antara suku Karo dengan bangsa Haru dalam sejarah awal munculnya. Terkait lokasi pertama, sebelum abad ke-20 M berada di Kota Stabat dan setelah abad ke-20 M di Kampung Hinai. Pada saat Siak menyerang Asahan, Deli, Langkat hingga Temiang dengan tujuan untuk menunjukkan sepermasnya dan memberi gelar pada raja-raja di Sumatera Timur. Mengetahui hal tersebut, Kerajaan Aceh memerintahkan pasukannya ke Sumatera Timur untuk menghapuskan Kerajaan Siak. Langkat yang sebelumnya tunduk pada Kesultanan Aceh, meminta

perlindungan Kesultanan Siak. Sejak saat itu Raja Langkat diakui sebagai Sultan dan terjadi perubahan dari kerajaan menjadi kesultanan.

Hubungan kerjasama dengan Belanda membuat semua sultan menjadi sangat kaya. Selain tembakau, kontrak juga ditandatangani untuk eksploitasi minyak 37,9 persen pendapatan diserahkan langsung kepada pihak Kesultanan Langkat. Dari pendapatan tersebut, pihak kesultanan membangun Masjid Azizi, tempat kedudukan kesultanan, dan mendirikan pusat pendidikan agama di Tanjung Pura. Pada tahun-tahun berikutnya, kekayaan yang bertambah seiring dengan pendapatan dari berbagai konsesi dan royalti. Hal tersebut menjadikan Kesultanan Langkat sebagai kesultanan Melayu terkaya di Sumatera Timur. Sultan juga memberikan lahan kepada etnis Melayu untuk dijadikan lahan pertanian. Meskipun berpenghasilan besar, gaya hidup boros Sultan Langkat mengakibatkan ia menumpuk hutang yang sangat besar. Akibatnya, Belanda yang mulai berkuasa, mengatur pinjaman untuk membayar hutang dan memberikan tunjangan bulanan kepada para sultan. Kerja sama dengan Belanda meluas ke kegiatan politik, yang nantinya menyebabkan Kesultanan Langkat takluk pada pemerintahan kolonial Belanda.

Langkat hadir menjadi sebuah daerah yang sangat majemuk dan memiliki populasi etnis dari berbagai suku-bangsa. Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, berhasil menyedot imigran dari berbagai daerah. Secara yuridiksi administratif, wilayah Langkat dibagi menjadi dua bagian, Langkat Atas yang berpusat di Binjai dan Langkat Bawah yang berpusat di Tanjung Pura. Kedua wilayah ini memiliki kepadatan populasi penduduk yang sangat berbeda, wilayah Langkat Atas dengan mengandalkan hasil alam dari hutan, memiliki populasi penduduk yang lebih sedikit. Sementara wilayah Langkat Bawah (pesisir) yang menjadi pusat pembukaan perkebunan dan ditemukannya pertambangan minyak bumi, memiliki populasi yang jauh lebih padat. Suku Jawa menjadi penduduk terbanyak yang mendiami wilayah Kesultanan Langkat diakibatkan para kuli kontrak yang bekerja di perkebunan rata-rata buruh dari Jawa. Setelah itu diikuti suku Melayu, Sunda, Minang, Batavia, dan Banten.

Pada masa kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda, masyarakat Indonesia dibagi empat kelas sosial, yaitu orang Eropa, bangsawan, penduduk asli (*inlander*), dan setara penduduk asli. Hak dan kewajiban empat kelas sosial di atas sangat berbeda-beda. Meskipun setara dengan penduduk asli, namun pada kenyataannya mereka dikenai hukum dan aturan terpisah terkait dengan pemerintah, yurisdiksi, pajak, pendidikan, kepemilikan tanah, unit milisi, pakaian, kebebasan bergerak, dan tempat tinggal. Dalam hal tertentu, mereka dikenai aturan untuk orang Eropa dan di lain pihak dikenai aturan untuk penduduk asli. Posisi tidak jelas ini, dilegitimasi dengan argumen kepentingan ekonomi penduduk asli harus dilindungi dari pengaruh luar, meskipun pengaruh orang Eropa tidak pernah disebut dalam konteks yang sama.

Kesultanan Langkat dikenal karena tiga faktor, yaitu perkebunan tembakau dan karet, kegiatan gerilyawan rakyat melawan Kolonial Belanda, dan lahirnya tambang minyak pertama di Indonesia. Sultan Langkat pada waktu itu, telah bersedia memberikan izin untuk membuka tambang minyak bumi kepada orang-orang Eropa. Konsesi yang diberikan ini, juga telah diberi persetujuan oleh Residen Sumatera Timur. Sebelum pembukaan perkebunan tembakau, Belanda harus membayar “uang hasil tanah” kepada Sultan. Berkat kekayaan yang didapat dari konsesi ini, setiap tahunnya sultan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk rakyat. Mereka diberikan uang yang cukup untuk membeli beras, minyak lampu, dan bantuan lainnya. Kekayaan ini juga dialokasikan untuk membangun masjid, membangun sekolah, dan mengirim putra daerah untuk menuntut ilmu ke Jawa atau luar negeri. Sultan juga memberikan satu liter minyak lampu dan hanya disuruh membacakan surat Yasin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesultanan Langkat merupakan salah satu yang berstatus sebagai “*lange politiek contract*”, yaitu mempunyai perjanjian politik yang tercantum di dalam berbagai pasal, di mana ditentukan hak dan kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda, dan selebihnya tetap berada dalam kekuasaan kesultanan. Hal ini juga tercantum juga di dalam kontrak

dan pembagian hasil minyak bumi, dari perusahaan minyak asing yang ada di wilayah ini.

Peralihan masa kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang, memunculkan periode sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, kedatangan Jepang sebagai pembebas dari belenggu penjajahan Belanda. Jepang merangkul masyarakat pribumi agar membantu dalam menjalankan politik-ekonomi ekspansionisme. Kehadiran Jepang membuat keadaan raja-raja semakin terdesak, disisi lain timbul keyakinan untuk tetap terus berkuasa. Meskipun harapan adanya perubahan, namun masyarakat di Sumatera Timur kurang melakukan perlawanan seperti di Aceh. Sifat kemajemukan menjadi penghalang munculnya pemimpin yang koheren. Namun, dari ditambah lagi kegiatan politik bukan menjadi tujuan utama.

Propaganda Jepang di Asia Timur Raya tidak mengandung suatu konsesi pihak manapun di Indonesia, khususnya Sumatera dan Malaya. Daerah ini merupakan bagian penting dari kekaisaran, sehingga bidang-bidang yang vital harus dikontrol dengan teliti. Partai-partai politik dan orang-orang yang sudah menjadi bagian dari mereka nantinya juga akan dilarang, dengan tujuan mencegah bangkitnya nasionalisme Indonesia. Pada masa ini terdapat tiga pemerintahan militer yang mempunyai kebijakan berbeda untuk setiap daerahnya. Kebijakan ini menerapkan dua prioritas, yakni menghapuskan pengaruh barat dan memobilisasi rakyat demi kemajuan perang. Pengerahan sosial terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur dan disekap dalam kamp tertutup. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai perawat, pelayan toko, dan disekolahkan. Bentuk pengerahan lainnya yang dilakukan, yaitu pengerahan romusha sebagai tenaga kerja paksa untuk persiapan perang Asia Timur Raya dan memenuhi kebutuhan tentara. Mereka juga dipekerjakan untuk membuat lapangan terbang, tempat pertahanan, jalan, gedung, dan lain-lain yang berada di bawah pengawasan militer. Belakangan, akibat kegiatan ini menimbulkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Masa pendudukan

Jepang selama 3,5 tahun menimbulkan dampak di bidang ekonomi dan sosial-budaya.

Tahun-tahun berikutnya Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai pertempuran di Pasifik. Belum lagi Jepang harus mempertahankan wilayah jajahan menyebabkan kejayaan Kekaisaran mulai terus terkikis. Harapan mereka semakin pupus ketika Amerika Serikat berhasil mendekati dan sudah dalam jangkauan tembak. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan setelah tercapai kemenangan. Dengan politik tersebut Jepang berharap agar rakyat Indonesia menganggap tentara Sekutu sebagai penyerbu. Puncaknya, dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Bagi rakyat Indonesia terdapat suatu kebebasan yang mendorong untuk menganggap dirinya sebagai pro-Republik. Kegembiraan terhadap revolusi segera melanda negeri ini, terutama pemuda. Mereka menyambut kemerdekaan dengan kegembiraan dan tantangannya. Sementara itu, para komando Jepang yang berada di daerah-daerah memilih menarik mundur pasukan dan meninggalkan wilayah perkotaan. Semangat revolusi juga terjadi dalam kesastraan dan kesenian untuk terlibat dalam politik.

Kesultanan Langkat jatuh sebagai akibat revolusi sosial Maret 1946, sebuah gerakan melawan apa yang dipandang sebagai bangsawan feodal dan pro-Belanda. Meskipun peristiwa yang disebut sebagai revolusi, para korban dari revolusi itu sendiri menganggap bahwa yang sebenarnya terjadi adalah genosida. Berbagai kekejian yang tak berperikemanusiaan menghampiri para keluarga sultan beserta para pendukungnya. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai revolusi kecuali hanya kekejian belaka. Apabila dicermati secara mendalam, barangkali hal ini ada benarnya. Ungkapan Revolusi Sosial terlalu lembut dari kejadian sebenarnya. Di masa-masa awal proklamasi, para kesultanan di Sumatera Timur sebenarnya telah sepakat untuk bergabung pada Republik Indonesia yang baru merdeka. Raja-raja dan Komite Nasional Pusat Sumatera Timur telah mengadakan pertemuan sebelum Revolusi Sosial tersebut. Tujuannya adalah daerah Sumatera Timur sudah siap menjadi bagian dari Republik Indonesia yang dipimpin secara

demokratis. Akan tetapi sebelum itu tercapai Revolusi Sosial telah merusaknya. Gambaran Revolusi Sosial sangat jauh dari makna yang terkandung dari frasa itu sendiri. Perubahan hal-hal mendasar secara cepat dibarengi dengan penghancuran moril dan materil yang sangat membekas. Kekejaman tersebut hanya dapat disetarakan dengan frasa genosida daripada revolusi.

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, kabar mengenai proklamasi bahkan belum sampai ke Kesultanan Langkat. Tapi tak lama kemudian, suasana mulai memanas dengan terbentuknya laskar-laskar terbentuk. Hal ini diperparah dengan adanya alasan untuk menguasai aset kesultanan dan faktor balas dendam mengakibatkan tidak terelakkannya peristiwa revolusi sosial. Pada saat itu banyak keluarga Kesultanan Langkat terbunuh, termasuk Tengku Amir Hamzah, yang merupakan penyair Angkatan Pujangga Baru dan pangeran Kesultanan Langkat. Puluhan orang yang berhubungan dengan swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam *Volksfront*. Penangkapan juga terjadi kepada para pengawal Istri-istri mereka, mereka ditangkap dan ditawan ditempat berpisah. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan dua orang putri Sultan Langkat pada malam jatuhnya Istana Darul Aman.

Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, Peradilan Rimba diterapkan bagi laskar-laskar menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke 26 bangsawan lainnya. Istana Darul Aman diserbu dan dibakar, akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Rakhmat Shah tak turut dibunuh. Ia beserta keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan hingga kemudian dibebaskan pada bulan Juli 1947. Setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rakhmat Shah wafat pada tahun 1948, para Sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai Pemangku Adat dan Kepala Keluarga Kerajaan.

Peristiwa “Revolusi Sosial” di Sumatera Timur, yang dalam masa awal kemerdekaan ini kawasan itu masuk menjadi bagian dalam Provinsi

Sumatera, memiliki latar belakang yang kompleks. Di antaranya adalah seperti berikut ini.

1. Sulitnya mencapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan para sultan, raja, sibayak, untuk membentuk Republik Indonesia di Sumatera setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian ada juga yang mendukung eksistensi Republik Indonesia. Di antaranya yang mendukung adalah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak.
2. Berita mengenai gagalnya musyawarah antara Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir dengan para sultan, raja, dan sibayak di Sumatera itu sampai di kalangan pemuda dan rakyat, yang sangat mendukung Republik Indonesia merdeka, dan mereka kemudian merasa geram, terhadap sikap para sultan dan raja di Sumatera ini.
3. Setelah Jepang menyatakan kalah perang kepada Sekutu pada tanggal 24 Agustus 1945, maka para raja dan sultan di Sumatera pada keesokan harinya 25 Agustus 1945 membentuk panitia penyambutan tentara Sekutu.
4. Pada tanggal 3 Oktober 1945 dibentuklah secara resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk Provinsi Sumatera. Keesokan harinya Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan membuat pernyataan bahwa semangat rakyat Indonesia selepas Perang Pasifik adalah berbeda dengan masa sebelumnya.
5. Masuknya tentara Belanda dan Inggris (NICA) di Indonesia di bawah komando Brigjen Ted Kelly, menambah buruknya situasi sosiopolitis. Tentara NICA membentuk tentara kelima (vijfd kolone) yang anggotanya adalah etnik Melayu yang berdiri di belakang para sultan dan raja Melayu. Didorong kepentingan kolonialisme yang pernah dirasakan, maka Inggris dan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentara Sekutu juga memanfaatkan tentara Jepang untuk membantu kepentingan Inggris.
6. Upaya terakhir yang dilakukan Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan pada 3 Februari 1946 adalah mengundang para

sultan, raja, dan sibayak seluruh Sumatera untuk merubah pendirian mendukung pemerintah Republik Indonesia, tetap tidak merubah sikap para sultan, raja, dan sibayak ini.

Dalam sejarah perjuangan pergerakan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Walaupun dua orang tokoh dari pulau Sumatera yaitu Mr. Teuku Mohammad Hasan dan dr. M. Amir mengikuti proses proklamasi kemerdekaan itu di Jakarta, dan kemudian pulang ke Medan, namun kampanye kemerdekaan, tidak memasyarakat dan membumi di kalangan penduduk di seluruh pulau Sumatera dan sekitarnya, dari Aceh hingga Lampung. Faktor utamanya adalah komunikasi dan transportasi saat itu tidak memadai untuk menyampaikan berita tentang proklamasi kemerdekaan tersebut kepada masyarakat.

Kenyataan sosial dan historis bahwa proklamasi kemerdekaan sudah diumumkan, barulah dipercayai banyak tokoh selepas saja berita yang sama mereka terima dari Adinegoro di Bukittinggi, kemudian dari dr. A.K. Gani di Palembang. Mereka juga menginformasikan pengangkatan Mr. Moehammad Hasan menjadi Gubernur Sumatera Republik Indonesia dan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) dan PNI. Namun kemudian melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X, pembentukan PNI ini dirubah dengan pembentukan partai-partai, artinya negara Republik Indonesia yang baru merdeka ini, menganut sistem multipartai.

Menurut Kahin “Revolusi Sosial” yang terjadi di Sumatera Timur adalah gerakan sosial yang terjadi di seluruh kawasan Sumatera Timur, oleh rakyat terhadap penguasa, khususnya di dalam wilayah-wilayah Kesultanan Melayu, yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 1946. Revolusi terjadi terjadi, terutama dipicu oleh gerakan kaum komunis yang ingin menghapus sistem kerajaan dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan komunisme. Gerakan yang dilancarkan komunis ini adalah antifeodalisme. Revolusi tersebut melibatkan mobilisasi rakyat (walaupun bukan mayoritas), yang berujung kepada pembunuhan anggota keluarga sultan dan bangsawan

Melayu yang dikenal pro-Belanda. Namun gerakan tersebut memperluas sasarannya yaitu golongan menengah pro-Republik Indonesia dan pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia. Selain itu, gerakan ini menggeneralisasi sasarannya, yaitu apapun yang berbau feodalisme dan kebangsawanan, tanpa memilah-milah jejak rekam para “korban”nya.

Dalam realitasnya, “Revolusi Sosial” disebabkan oleh berbagai faktor sosiopolitis yang kompleks. Salah satu di antaranya adalah situasi masyarakat Sumatera Timur yang majemuk, namun yang mengalami perubahan-perubahan sosial yang mendasar, terutama yang terjadi pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945).

Dalam rangka menuju Indonesia merdeka ini, kehidupan kaum bangsawan, tidak lagi seindah dan menyenangkan di zaman Belanda. Terutama dari sudut kekuasaan ekonomi dan politiknya. Memang secara resmi, eksistensi para raja, sultan, dan kerabatnya tetap diakui dan dihargai oleh pemerintah Jepang di Indonesia, namun demikian yang terjadi adalah bahwa kewibawaan politis mereka merosot secara perlahan dan pasti.

Zaman pendudukan Jepang di Indonesia ini juga memunculkan para pemimpin politik yang secara general tidak simpati dan empati kepada kaum bangsawan. Para pemimpin politik ini, perjuangannya berdasar kepada ideologi nasionalisme, yang tentu saja sedikit banyaknya bertentangan dengan ideologi kebangsawanan. Selain itu juga, muncul sesuai dengan perkembangan zaman yaitu kelompok-kelompok pemuda yang terlatih secara militer, yang pada awalnya dibentuk dan dikondisikan untuk kepentingan pemerintah Jepang di Indonesia dalam konteks Perang Dunia Kedua. Para pemuda yang terlatih militer inilah yang justru memiliki pengaruh luas, mendalam, dan membakar jiwa para pemuda, untuk bebas sebagai manusia, setelah terbentuknya Republik Indonesia dan Revolusi Kemerdekaan. Selain itu, timbul pula perbedaan latar belakang ideologis dan pengalaman, yang bahkan acapkali diiringi oleh rasa saling tidak percaya dari para pemimpin bangsa. Keadaan sosiopolitis ini dipersulit pula dengan datangnya tentara Sekutu sebagai pemenang pada Perang Dunia Kedua, yang diboncengi oleh NICA, yang mau menguasai Indonesia kembali. Dalam rangka menancapkan

kolonialismenya kembali, maka Belanda beserta tentara Sekutu ini berusaha merebut hati para sultan, raja, sibayak, dan bangsawan, untuk mendukungnya. Selain itu, NICA secara terang-terangan membangun kekuatan militer, antara lain dibentunya pasukan Raymond Westerling, yang bertindak amat kejam membunuh rakyat tak berdosa secara membabituta.

Dalam periode ini, Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Sumatera, di bawah pimpinan Mr. Teuku Mohammad Hasan efektif berfungsi secara terbatas, sebagai penghubung (komunikator) antara Jepang, Inggris, dan kerajaan-kerajaan di Sumatera di satu pihak, dan pemuda-pemuda yang berjuang di pihak lain. Namun demikian, dalam realitas sosial, Mohammad Hasan tidak mempunyai hubungan langsung dengan sesuatu kekuatan pemuda yang penting apa pun. Modal penting bagi Moehammad Hasan adalah prestise yang diberikan Pemerintah Republik kepada para pemudanya (Reid, 1987:360).

Sebahagian besar keputusan politis dalam konteks pengelolaan pemerintahan di Sumatera oleh Gubernur Mohammad Hasan, adalah mengikuti cara-cara pemerintah pusat Jakarta yang relatif masih baru dan penuh gejolak sosiopolitis ini. Pada saat beliau mengumumkan susunan anggota pemerintahan Provinsi Sumatera yang pertama, pada tanggal 4 Oktober 1945, Moehammad Hasan masih banyak menempatkan para pejabat yang dahulu merupakan pimpinan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengisi jabatan Residen Sumatera Timur, beliau mengangkat Mr. Luat Siregar. Begitu juga jabatan Walikota Medan dipercayakannya kepada Mr. Moehammad Joesoef. Dilihat secara kuantitatif, Mohammad Hasan lebih banyak mengangkat para pejabat di jajaran pemerintahannya yang dahulunya para pejabat pemerintahan Hindia Belanda.

Kemudian selepas itu, pada penetapan pejabat pemerintahan Provinsi Sumatera pada tanggal 29 Oktober 1945, beliau mengangkat Amir Hamzah sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia (kemudian menjadi bupati) untuk wilayah Langkat yang pusat pemerintahannya berkedudukan di kota Binjai. Demikian pula Tengku Musa untuk Asahan, dan Tengku Hasnan untuk Labuhanbatu. Tengku Musa di Asahan dan Tengku Amir Hamzah di

Langkat tidak menolak pengangkatannya dari Republik Indonesia melalui gubernur Sumatera ini, tetapi mereka masih terus bekerja juga sebagai pejabat kerajaan Melayu. Ini merupakan sikap yang memang harus diambil oleh para pejabat Melayu. Bagaimanapun di satu sisi, mereka adalah cinta dan memperjuangkan tegaknya Republik Indonesia. Namun di sisi lain, setiap orang Melayu juga diajarkan untuk tidak “derhaka” kepada para sultannya sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi mereka para pejabat Melayu ini, berada dalam dua persimpangan jalan, yang sulit disatukan, walau ada contohnya di Jawa di Kesultanan-kesultanan Yogyakarta dan Surakarta.

Kondisi sosial lainnya di kala itu adalah di kalangan para sultan, raja, dan bangsawan Melayu di Sumatera Timur, “tidak sepenuhnya” memihak kepada Republik Indonesia yang merdeka ini. Mereka belajar dari sejarah, bahwa di masa penjajahan Belanda, kekuasaan politik dan ekonomi para sultan dan raja ini adalah lebih besar dibanding zaman Jepang, dan apalagi di era kemerdekaan. Oleh karena itu sebahagian besar sultan, raja, datuk, sibayak, dan kaum bangsawan umumnya menunggu perkembangan sosiopolitis yang terjadi dan memanfaatkan situasinya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Oleh karena itu, di satu sisi para sultan, raja, datuk, sibayak, dan kaum bangsawan Sumatera Timur berdiri di antara Republik Indonesia, juga Belanda, dan Inggris.

Kesultanan Deli yang pusat pemerintahannya berada di kota Medan, menempatkan kesultannya langsung berhubungan sosiopolitis langsung dengan Inggris, Belanda, dan sekaligus pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Medan, tanpa sepengetahuan Wakil Pemerintah NRI di daerah itu, yakni Tulus, mantan pegawai di zaman Belanda. Hubungan antara Republik Indonesia dengan kesultanan-kesultanan Melayu ini, tidak ditentukan dengan pengangkatan-pengangkatan seperti ini, tetapi lebih ditentukan oleh situasi kekuatan (politik dan militer) yang nyata.

Meletusnya “Revolusi Sosial” di Sumatera Timur tidak terlepas dari sikap sultan-sultan yang tidak begitu antusias dan simpati terhadap kemerdekaan Indonesia karena setelah Jepang masuk. Hanya Kesultanan

Langkat yang paling jelas sikapnya sejak awal mendukung Republik. Pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambilalih oleh para buruh dan petani. Sikap kaum bangsawan ini, berdasarkan jejak rekam sejarah tersebut, tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali, seperti di masa kolonial Belanda, dengan bekerjasama dengan Belanda yang masuk kembali ke sini menunggangi NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak yang pro Republik.

Di sisi lain, pihak yang pro kepada Republik Indonesia mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa, seperti pemerintahan swapraja atau kerajaan dihapuskan saja, kemudian menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro republik sendiri terpecah menjadi dua faksi; yang pertama adalah faksi moderat yang menghendaki pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan. Yang kedua adalah kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan di seluruh wilayah Sumatera Timur.

“Revolusi Sosial” di Sumatrera Timur, terjadi dalam tiga wilayah kebudayaan, yang memang menonjol keberadaan kerajaan-kerajaannya. Peristiwa ini terjadi di: (1) Tanah Karo, (2) Simalungun (Kerajaan Panei, Tanoh Jawa, Kerajaan Siantar, Kerajaan Purba, Kerajaan Silimakuta, Kerajaan Raya, dan Kerajaan Dolog Silau), dan (3) Melayu (Kesultanan Asahan, Kesultanan Kotapinang, Kesultanan Kualuh, Kesultanan Panai, Kesultanan Bilah, Kedatuan Batubara, Kesultanan Serdang, Kesultanan Deli, dan Kesultanan Langkat).

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan para sultan, raja, sibayak, dan para bangsawan di Sumatera ini, maka pada tanggal 30 November 1945, Sultan Langkat menerima ultimatum dari Pesindo yang menuntutnya pengakuan segera atas Republik Indonesia, menghapuskan semua hubungannya dengan Inggris dan NICA, dan penyerahan dua pertiga dari seluruh senjatanya kepada Pesindo.

Sultan Langkat pada 4 Desember 1945 menyatakan dukungan dan sumbangannya sejumlah 10.000 gulden kepada para pejuang Republik Indonesia. Namun demikian, sejak saat itu Sultan Langkat tidak lagi berani mengadakan pembicaraan langsung dan terang-terangan dengan wakil-wakil Belanda di Sumatera Timur. Di tempat lain, pada waktu yang bersamaan dikabarkan bahwa Sultan Serdang dan Sultan Asahan telah menaikkan bendera merah putih di seluruh wilayah kekuasaannya dan menyatakan juga dukungannya untuk Republik Indonesia. Hanya Sultan Deli yang baru, yaitu Sultan Osman yang masih bisa mengharapkan perlindungan Sekutu atas istananya di kota Medan dan menjauhkan diri dari Republik Indonesia. Sultan Deli mengharapkan hubungan politis langsung dengan Mahkota Belanda di bawah seorang komisaris tinggi, dan menempatkan raja-raja Melayu di luar setiap bentuk negara Indonesia.

Situasi politik nasional lainnya, juga mendorong terjadinya “Revolusi Sosial” tersebut. Dengan terpilihnya Sutan Syahrir menjadi Ketua KNIP kemudian Perdana Menteri Republik Indonesia, maka beliau menganjurkan untuk melakukan penyegaran di dalam tubuh KNI, juga di daerah-daerah seluruh Indonesia. KNI pun mulai memberi tempat yang lebih besar kepada tokoh-tokoh yang lebih mapan secara politik. Ini juga menimbulkan pertanyaan apakah bentuk republik atau kerajaan, ataukah suatu bentuk kombinasi dari keduanya, yang akan menjadi bentuk pokok pemerintahan di luar kota-kota.

Sebagai Ketua KNI Sumatera Timur, Luat Siregar menyatakan bahwa sudah bulat sikapnya agar raja-raja itu harus menerima semangat demokrasi yang dibawa oleh perubahan zaman atau harus menyingkir. Luat Siregar dan Dr. Amir telah begitu terkesan oleh kerjasama yang harmonis antara Republik Indonesia dengan Kasultanan Yogyakarta ketika mereka berkunjung ke Jawa. Segera ketika mereka kembali dari Jawa pada tanggal 12 Januari 1946, mereka membicarakan dengan bekas majikan Dr. Amir, Sultan Langkat, untuk memprakarsai dan menjadi tuan rumah suatu konferensi kerajaan yang akan membahas masalah ini di Tanjungpura.

Dengan demikian sikap politis, situasi sosial, kepentingan faksi-faksi, sejarah kekuasaan, dan lain-lainnya, maka terkulminasilah sebuah revolusi [genosida kepada para bangsawan] di Sumatera Timur.

Ketika Gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hasan baru saja melakukan perjalanan keliling ke seluruh pelosok pulau Sumatera. Revolusi sosial meletus di Sumatera Timur, yang tujuannya melenyapkan orang-orang dipandang sebagai bekerjasama dengan penjajah. Dalam realitasnya revolusi ini bukanlah letupan sosial yang berskala kecil (Abrar Yusra, 1996:69). Tetapi cukup besar dan memakan korban. Kejadiannya dimulai dari peristiwa "malam berdarah."

Istilah dan kejadian "malam berdarah" adalah merujuk kepada peristiwa pembunuhan raja-raja dan kaum bangsawan di Sumatera Timur. Peristiwa ini merupakan satu bentuk revolusi yang dilakukan kelompok radikal di dalam tubuh Persatuan Perjuangan (PP) yang mencakup pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), di samping itu juga didukung oleh Laskar Barisan Harimau Liar (BHL), dan Tentara Sabilillah. "Revolusi Sosial" di daerah ini terjadi pada bulan Maret 1946.

Peristiwa malam berdarah terjadi tanggal 3 Maret 1946, dengan tujuan melenyapkan raja-raja dan kaum bangsawan yang memihak Belanda sejak masa kolonial. Mereka ini dipandang oleh kaum yang pro Republik Indonesia, ragu-ragu dalam menerima kemerdekaan dan berharap Belanda akan berkuasa kembali. Di samping usaha pelenyapan raja-raja dan kaum bangsawan, tujuan revolusi ini juga adalah untuk menguasai harta kekayaan raja-raja itu, yang secara genealogis berabad-abad memerintah, yang mereka peroleh dari keistimewaan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan alasan sosiologis ini, maka mereka melakukan perampokan, penculikan, dan pembunuhan, di seluruh wilayah Sumatera Timur, terutama di tiga wilayah budaya: Simalungun, Karo, dan Melayu.

Pada pertemuan-pertemuan Persatuan Perjuangan di Brastagi, Pematang Siantar, dan Tanjungbalai masalah terhadap raja-raja itu telah

dibahas. Masalah utama adalah terjadinya kontak-kontak para bangsawan ini dengan Belanda. Begitu pula dengan dibentuknya comite van ontvangst, pengawal-pengawal bersenjata pada beberapa daerah, dan bahan-bahan propaganda politis Belanda yang diperkirakan disimpan di istana-istana Kesultanan Melayu atau bangsawan Simalungun dan Karo.

Tindakan yang dilakukan pada 3 Maret 1946, pertama menangkapi raja dan pendukung-pendukung utamanya. Kedua, masuk ke istana-istana untuk mencari harta kekayaan mereka dan bahan-bahan propaganda pro-Belanda yang diperkirakan akan dapat diketemukan. Perlawanan dari pihak kerajaan diperkirakan tidak akan menjadi masalah serius, karena tindakan telah dijalankan pada malam hari tanggal 3 Maret 1946.

Selanjutnya Tanah Karo Simalem menjadi contoh dari salah satu cara operasinya. Segera secara terburu-buru mereka mengadakan “rapat” Persatuan Perjuangan pada 3 Maret 1946 di Brastagi, dan memastikan hadirnya para Raja Urung dan Sibayak. Tujuh belas orang kemudian ditangkap dan diasingkan di Aceh Tengah. Di antaranya yang ditangkap termasuk wakil Pemerintah NRI dan kedua bersaudara Nerus dan Nolong Ginting Suka, yang merupakan orang-orang kuat dalam politik.

Di tempat lain yaitu di Simalungun, sebahagian besar pasukan bersenjata terdiri dari para pemuda Batak Toba yang mendirikan markasnya di Pematang Siantar dan perkebunan-perkebunan. TKR sejak Januari 1946 diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam konteks ini ketua Persatuan Perjuangan memberikan instruksinya kepada para pemimpin Pesindo, Napindo (BHL), dan PKI di Pematang Siantar, untuk menangkapi raja-raja di Simalungun. Namun sebelumnya telah disetujui bahwa peranan utama kegiatan ini akan dilakukan oleh BHL untuk mencegah terjadinya tuduh-menuduh yang bersifat kesukuan, terutama di daerah tradisional pedalaman Simalungun. Raja dari Pane dan seluruh keluarganya ditangkap BHL pada 3 Maret 1946. Selanjutnya harta dan bendanya dirampas. Raja ini dan beberapa pengikutnya dibawa ke tempat pertahanan BHL, di tempat ini diadakan upacara pesta, dan kemudian raja dan segenap keluarganya dibunuh.

Pada keesokan harinya Barisan Harimau Liar mengejar dan menangkap raja dari Raya, yang dibawa ke jembatan besar dan selanjutnya dibunuh. Rumahnya diobrak-abrik, emas dan barang berharganya dirampok. Raja ketiga di Hulu Simalungun, yaitu Raja Purba bernasib mujur, karena telah diselamatkan pasukan TRI dari penangkapan yang dilakukan BHL.

Raja yang keempat yang menjadi target adalah Raja Silimakuta, yang pada saat itu berada di Pematang Siantar. Rumahnya dikepung, disergap, dan akhirnya dibakar. Namun sebagaimana halnya Raja Purba, Raja Silimakuta ini mendapatkan pengamanan TRI di Pematang Siantar. Walau demikian, beberapa kaum keluarganya tidak sempat diamankan oleh TRI, dan menjadi korban dalam revolusi ini.

Kekerasan yang dimulai 3 Maret 1946 itu, paling parah berlaku di Kabupaten Asahan di bahagian selatan Keresidenan Sumatera Timur. Di sini tidak terdapat kekuatan moderat antara pemuda bersenjata dan segolongan pejabat pendukung kerajaan. Satu-satunya kekuatan TRI di seluruh kabupaten ini hanyalah sepasukan kecil di Tanjung Balai yang condong menyokong kerajaan.

Pada tanggal 3 Maret 1946 ribuan orang bersenjata berkumpul di Tanjung Balai sebagai reaksi dari desus-desus yang sampai ke telinga mereka, bahwa Belanda akan melakukan pendaratan. Mereka dikerahkan untuk mengepung istana. Pada saat itu, terjadi tembak-menembak kelompok bersenjata dengan TRI dan polisi yang berusaha dan mencoba melindungi istana. TRI dan polisi ini akhirnya terpaksa menyerah dan istana diserbu, namun Sultan Asahan yang muda dan gesit itu meloloskan diri, saat itu terjadi pengejaran yang menegangkan. Sultn Asahan bersembunyi di rawa-rawa bakau dan tiga kali berenang menyeberangi sungai. Akhirnya Sultan Asahan ini berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi pada sebuah pos pengawal peninggalan tentara Jepang.

Tindakan radikal dan ganas pula dilakukan pada lima kerajaaan kecil daerah Labuhan Batu, di bahagian paling selatan Sumatera Timur. Gerakan pertama pada tanggal 3 Maret 1946 hanya dilancarkan terhadap ibukota

distrik itu, yaitu Rantauprapat tempat kedudukan Sultan Kualuh. Wakil pemerintah NRI, Tengku Hasnan dan tiga pembantu utamanya, disergap pada tengah malam dan dibawa ke pinggir sungai yang curam, yang lainnya sempat lebih dulu terjun ke sungai menyelamatkan dirinya. Pada waktu yang sama, Istana Sultan Kualuh di Tanjungpasir dikepung, kemudian diserbu dan semua penghuninya ditawan. Sultan Kualuh yang telah berusia tua bersama salah seorang putranya, pada keesokan diketemukan sedang sekarat akibat tusukan tombak di perkuburan Cina.

Kesultanan yang paling cukup terlindung adalah sedang bukan saja karena sejarahnya yang relatif anti-Belanda, tetapi juga karena pasukan TRI di Perbaungan, kota kedudukan Sultan Serdang, berada di bawah pimpinan Kapten Tengku Noerdin. Kapten ini adalah seorang aristokrat muda bekas perwira yang dididik dalam Giyugun, dan Tengku Nizam yang menjadi ketua KNI daerah itu. Kapten Noerdin mendapat persetujuan dari Kolonel Ahmad Tahir, pimpinan TRI, untuk mengambil kekuasaan di tangan mereka sendiri.

Teror berkecamuk di wilayah NRI yang makmur ini. Dalam kesempatan ini, rencana PKI paralel dengan rencana NICA, yaitu menimbulkan anarki di wilayah NRI. Hanya Istana Serdang yang tidak diserbu. Pada malam itu, PanglimaTKR, Kolonel A. Tahir yang sedang rapat staf, menerima telpon dari TKR Pematang bahwa terror telah meletus dan raja-raja telah dibunuh PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalyon TKR di Melati) agar mengambil alih pengwalan keraton kota Galuh di Perbaungan.

Istana Sultan Deli yang terletak di dekat “benteng” pertahanan Sekutu di Medan, berada dalam perlindungan Inggris. Pemuda-pemuda Melayu yang diorganisasi pada PADI dengan persenjataannya, bersama dengan pasukan kelima yang persenjataannya relatif lumayan, siap sedia membela kaum Melayu Deli, terutama bangsawannya yang sedang terancam jiwa dan raganya. Oleh karena itu, istana dan kerabat Kesultanan Deli relatif aman dari gelombang revolusi ini.

Istana Langkat dipertahankan oleh Penjaga Istana Langkat (PIL) yang pada bulan Januari 1946, para penjaga istana ini telah dibekali oleh Inggris sekitar 40 pucuk senjata. Pasukan penjaga istana ini menjadi kuat, melalui persekutuannya dengan pasukan kelima. Tugas pertama pemuda-pemuda revolusioner di Langkat itu ialah menyapu bersih kekuatan-kekautan bersenjata ini.

Pertempuran sengit berlangsung di Sunggal (Serbanyaman), perpecahan yang mengandung dendam sejak tahun 1942 itu tidak pernah bisa diatasi dan datuk yang berkuasa di situ mempunyai senjata yang cukup. Inggris melaporkan 20 orang yang mati dalam pertempuran di Sunggal, tetapi jumlah ini bertambah lagi 2 hari kemudian, ketika lima orang Melayu kembali ke Sunggal untuk mati secara terhormat dengan jalan mengamuk membunuh musuh-musuhnya. Di Labuhan Deli juga terjadi pertempuran kecil-kecilan yang berakhir dengan ditangkapnya sejumlah 40 orang Melayu, termasuk pemimpin-pemimpin PADI dan penghulu, pasukan kelima dipukul hancur.

Istana Langkat di Tanjung Pura adalah terlampaui kuat bagi para pemuda revolusioner untuk dikuasai pada penyerbuan pertama. Sejak 4 Maret 1946 Pesindo Binjai mulai menagkapi pejabat-pejabat Kerajaan Melayu Langkat. Di antara pertama diambil dari rumahnya ialah Tengku Amir Hamzah, yang secara resmi masih menjadi wakil pemerintah NRI.

Di Tanjungbalai Asahan, pada tanggal 3 Maret 1946 sejak pagi ribuan massa telah berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjungbalai. Namun kerumunan itu berubah haluan--mengepung istana Sultan Asahan. Pada awalnya gerakan massa tersebut dihadang oleh Tentara Republik Indonesia. Karena jumlah tentara ini relatif sedikit, maka massa berhasil menyerbu Istana Sultan Asahan. Pada keesokan harinya, para bangsawan Melayu berjenis kelamin lelaki di Sumatera Timur ditangkap dan dibunuh oleh massa ini. Dalam hitungan beberapa hari saja, 140 orang dibunuh oleh massa ini. Di dalamnya termasuk para penghulu, pegawai didikan Belanda, dan sebagian besar bangsawan Melayu bergelar Tengku. Di

Tanjungbalai dan di Tanjungpasir sebahagian besar kelompok bangsawan mati dibunuh.

Pada tanggal 5 Maret 1946 Wakil Gubernur Mr. Amir mengeluarkan pengumuman bahwa gerakan itu suatu “Revolusi Sosial.” Dalam kenyataannya, keterlibatan aktivis Partai Komunis Indonesia dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan andil yang cukup besar. Ditambah lagi pada tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur dr. Amir secara resmi mengangkat M. Joenoes Nasution, yang juga ketua PKI Sumatera Timur sebagai Residen Sumatera Timur. Untuk meminimalkan korban Revolusi Sosial, Residen Sumatera Timur M. Joenoes Nasution untuk sementara waktu bekerjasama dengan BP KNI maupun Volksfront, dan Mr. Luat Siregar diangkat menjadi juru damai (pacifikator) untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya.

Ketegangan-ketegangan sosiopolitis yang ditimbulkan oleh Persatuan Perjuangan (PP), berakhir setelah tanggal 11 April 1946. Persatuan Perjuangan memutuskan untuk berdiri teguh di belakang pemerintah dan menyerahkan masalah penangkapan tersebut. Penangkapan dan pengadilan seseorang yang terlibat dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur hanya dilakukan oleh pemerintah dibantu PP.

Perpecahan antara kelompok-kelompok pemuda pejuang dan kaum kerajaan yang konservatif di Sumatra timur berkembang semakin parah. Pemuda sesungguhnya memiliki kekuatan fisik, tetapi mereka begitu tercerai-berai sehingga setiap usaha memanfaatkan mereka akan menciptakan hantu anarki. Pihak kerajaan tetap mempertahankan pemerintahannya yang samar-samar, tetapi ini pun berangsur-angsur semakin tersisih dari hakikat kekuasaannya. Pengaruh raja-raja Melayu dan Simalungun sekarang hanya terbatas berlaku pada pengikut-pengikut sesukunya sendiri di daerah-daerah pedesaan.

Rupa-rupanya Dr. Amir dan M. Joenoes Nasution telah merekayasa pergerakan rakyat sedemikian rupa untuk memuluskan perjuangan rakyat, terwujudnya pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat di Sumatera.

Merangsang perjuangan rakyat dengan membumihanguskan benteng kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, memabat habis keturunan Sultan, Datuk, Raja, Tuan, dan menggantikan kekuasaannya menjadi kekuatan rakyat.

Akhirnya dengan mulus, gerakan revolusi memaksa penghapusan otonomi kekuasaan Sultan, Raja dan Tuan di Sumatera Timur secara resmi diproklamirkan. Revolusi sosial menyisakan cerita pembantaian jutaan nyawa, pemenggalan jutaan kepala di Sumatera Timur. Keterlibatan aktivis Partai Komunis dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan kontribusi besar. Terlebih lagi Ketua PKI Sumatera Timur waktu itu, yaitu M. Joenes Nasoetion, kemudian diangkat langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera dr. Amir sebagai Residen Sumatera Timur, sehingga revolusi ini terus berlangsung sekian waktu. Tentara pemerintah Republik Indonesia waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Pergerakan aktivis pro kemerdekaan yang semula terorganisasi dengan baik, malah menjadi brutal sehingga kekacauan pun terjadi di seluruh Sumatera Timur. Aksi “Revolusi Sosial” di Sumatera Timur bagaimanapun mencoreng perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di mata dunia internasional.

Sampai sekarang istilah Revolusi Sosial masih manuai pro-kontra. Dalam pandangan subjektif, setelah membaca tragedi yang dialami Kesultanan Langkat, kata revolusi sosial tidak tepat, melainkan pembantaian atau kerusuhan. Penelitian ini mengalami kendala untuk menemukan bukti kuat yang menyebutkan siapa sebenarnya pihak-pihak yang terlibat, untuk mengonfirmasi seberapa keras fakta sejarah yang membuktikan golongan komunis merupakan dalang di balik kerusuhan di Langkat. Intinya penelitian ini belum selesai. Tentunya sangat terbuka bagi penulis lainnya yang dapat memberi kritik, sanggahan, bahkan meluruskan hasil penelitian ini. Tentunya dalam koridor akademik. Sesungguhnya hasil penelitian ini sebagai sebuah karya sejarah mustahil bisa menyenangkan hati semua orang. Pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun perlu dibudayakan tradisi akademik. Menrespons karya dengan karya. Oleh karena itu, tim penulis

menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.